

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2010  
(Studi Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN/ PDG)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
T.A. 2019 M**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN TANAH IAIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN 2010  
(Studi Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG)  
Oleh : SETRIANIS  
ABSTRAK**

Pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010 itu dilakukan secara langsung oleh Prof. Dr. Sirajuddin Zar, M.A. selaku Rektor IAIN Imam Bonjol Padang yang dibantu oleh 4 (empat) kepanitiaan yaitu panitia pengadaan tanah, panitia sekretariat, satuan tugas (Satgas) dan Tim Pembantu Lapangan. Selain 4 (empat) kepanitiaan di atas, dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pemeriksa dan Penerima pekerjaan, Tim Appraisal dan Notaris. Permasalahannya adalah ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka bagaimanakah pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010 serta pertimbangan hakim dalam putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Setelah penulis menganalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana dan kewenangan maka proses pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tergolong kepada pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan umum yang dilakukan secara langsung oleh IAIN Imam Bonjol Padang. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang itu harus dibuktikan dari unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan sesuai dengan acuan dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010 itu tidak bisa dibebankan kepada panitia pengadaan tanah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu unsur perbuatan pidana. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG adalah salah karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga putusan yang tepat untuk Terdakwa adalah putusan bebas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Tanah.

**CRIMINAL LIABILITY IN CRIMINAL ACTS IN CORRUPTION LAND  
ACQUISITION IMAM BONJOL PADANG STATE ISLAMIC INSTITUTE  
IN 2010**

**(Case Study No. 26 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.PDG)**

By: SETRIANIS

ABSTRACT

The IAIN Imam Bonjol Padang land acquisition in 2010 was carried out directly by Prof. Dr. Sirajuddin Zar, M.A. as the chancellor of IAIN Imam Bonjol Padang and was assisted by 4 (four) people namely the land acquisition committee, the secretariat committee, the task force (Satgas) and the Field Assistance Team. The problem arose when a criminal act of corruption was found. In addition to the 4 (four) registries, the land acquisition of Imam Bonjol Padang in 2010 also involved Commitment Making Officers (PPK), the Examining and Recipient Committee, the Appraisal Team and Notary Public. The problem is when there is a criminal act of corruption, then how is the evidence and criminal responsibility in the criminal act of corruption in the 2010 IAIN Imam Bonjol Padang land acquisition as well as the judge's consideration in the ruling No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG? To answer the problem, the writer applied normative research with a normative juridical approach and type of analytical descriptive research. The writer utilized legal materials in the form of laws and regulations, judges' decisions and other legal materials that are relevant to this study. After the writer analysed the materials employing the theory of criminal responsibility and authority, the process of IAIN Imam Bonjol Padang land acquisition fell to the category of land acquisition for the implementation of development apart from the public interest which is carried out directly by IAIN Imam Bonjol Padang. Proof of corruption in the procurement of Imam Bonjol Padang's IAIN land must be proven from the elements of criminal acts and errors in accordance with the reference in the procurement of Imam Bonjol Padang's IAIN land. Criminal liability in criminal acts of land acquisition IAIN Imam Bonjol Padang in 2010 cannot be charged to the land acquisition committee because one of the elements in criminal responsibility is not fulfilled, namely the element of criminal action. Therefore, the judge's consideration in decision No. 26 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.PDG is wrong because the Defendant has not been proven to have committed an unlawful act as charged by the Public Prosecutor, so that the right decision for the Defendant is a free decision.